



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

Dilihat dari perkembangan Negara kita Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai saat ini tergambar bahwa dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengalami banyak perubahan, baik ditinjau dari segi keuangan maupun segi pengawasan dan pembangunan. Suatu kenyataan bahwa pemberian kewenangan atas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan sebuah langkah awal untuk mempercepat pembangunan pada suatu daerah. Tata Pemerintahan yang baik tentu menjadikan dambaan semua pihak, baik pihak birokrat maupun pihak masyarakat. Mutu pelayanan yang diberikan birokrasi akan sangat menentukan dalam kepuasan masyarakat yang akan berdampak langsung pada organisasi publik, agar kedepannya dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, tujuan pemberian otonomi daerah sebagaimana

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur Pemerintahan Desa terdapat seperangkat aparaturnya yang memiliki tugas untuk melaksanakan Pemerintahan Desa sebagai suatu komponen untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Desa. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dan pada gilirannya dapat menunjang keberhasilan pemerintahan desa.

1. Kepala Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Sekretaris Desa

Peran Kepala Desa dalam pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dapat dibentuk dan dihapus atau bahkan dapat digabung dengan memperlihatkan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pembentukan pemerintahan desa dilakukan oleh segenap masyarakat desa.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu syarat utama yang paling mendukung terwujudnya masyarakat yang madani dan adil, makmur dan beradab, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Desa keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan seluruh masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan terdepan. Dalam memimpin agar terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa maka dengan itu Kepala Desa diberi kewenangan atau disertai wewenang penuh baik dalam bidang politik maupun dalam bidang administrasi sehingga timbullah Otonomi. Otonomi disini artinya kebebasan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Salah satu bentuk Otonomi Desa adalah memiliki kepala desa sendiri. Hak memiliki kepala desa ini dianggap sangat penting karena mengingat begitu besar peranan Kepala Desa yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai aspek. Diperlukannya kepala desa karena masyarakat merasa perlu untuk diayomi dan dilindungi guna menjadikan kehidupan masyarakat desa menjadi masyarakat yang merasakan kesejahteraan baik dalam bidang administrasi, pelayanan, sosial, politik dan lainnya.

Tabel 1.1
Daftar Nama Kecamatan Dalam Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Kecamatan
1	Kecamatan Batang Cenaku
2	Kecamatan Batang Gansal
3	Kecamatan Batang Peranap
4	Kecamatan Kelayang
5	Kecamatan Kuala Cenaku
6	Kecamatan Lirik
7	Kecamatan Lubuk Batu Jaya
8	Kecamatan Pasir Penyu
9	Kecamatan Peranap
10	Kecamatan Rakit Kulim
11	Kecamatan Rengat
12	Kecamatan Rengat Barat
13	Kecamatan Seberida
14	Kecamatan Sungai Lala

Sumber : Kantor Desa Sei Beras-Beras Tahun 2018

Kabupaten Indragiri Hulu atau sering di singkat menjadi Inhu adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu berada di kota rengat. Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas 8.198,26 km², dengan pembagian administratif sebanyak 14 Kecamatan dan peneliti melakukan penelitian pada Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Daftar Nama Desa Dalam Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Desa
1	Desa Air Putih
2	Desa Kulim Jaya
3	Desa Lubuk Batu Tinggal
4	Desa Pondok Gelugur
5	Desa Pontian Mekar
6	Desa Rimpian
7	Desa Sei Beras Hilir
8	Desa Sei Beras-Beras
9	Desa Tasik Juang

Sumber : Kantor Desa Sei Beras-Beras Tahun 2018

Kecamatan Lubuk Batu Jaya merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan pembagian sebanyak sembilan Desa, dan peneliti juga melakukan penelitian di Desa Sei Beras-beras.

Desa Sei Beras-beras terletak di Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang merupakan sebuah Desa Transmigrasi. Nama Desa Sei Beras-beras berasal dari Kata Sei (Sungai) dan Beras (Padi). Nama tersebut berasal dari adanya seorang Warga yang sedang membawa beras, beras tersebut jatuh ke sungai dan itulah Asal-usul Nama Desa Sei Beras-beras.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Berdasarkan Pendidikan Pemerintahan Desa Sei Beras-beras Kecamatan
Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir
1	Slamet Raharjo	Kepala Desa	S1
2	Ahyani	Sekretaris Desa	SLTA
3	Prayitno	Kaur Pemerintahan	SLTP
4	Jaimun	Kaur Pembangunan	SD
5	Hartoyo	Kaur Umum	SLTP
6	Topandi	Kaur Kesra	SLTA
7	Rosmin Daryono	Kaur Keuangan	SLTP
8	Edi Kuncoro	Kadus I	SD
9	Rohimin	Kadus II	SD
10	Marjono	Kadus III	SD
11	Jumadi	Kadus IV	SLTP

Sumber : Kantor Desa Sei Beras-beras Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan yang ada pada suatu Pemerintahan Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, dengan latar belakang pendidikan terakhirnya S1 hanya satu orang yang itu Kepala Desa, tingkat SLTA sebanyak 2 orang, SLTP sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak 4 orang. Dalam hal ini dianggap kurang efektif jika dilihat dari tingkat pendidikan terakhirnya karena kurangnya pengetahuan dan skill yang dimiliki dari setiap individu atau anggota dalam organisasi pemerintahan desa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
Berdasarkan Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa Sei Beras-Beras
Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir
1	Kasman	Ketua	SLTP
2	Slamet A	Wakil Ketua	SD
3	Nurhadiyanto	Sekretaris	SLTP
4	Slamet	Bendahara	SLTP
5	Sawon handoko	Anggota	SD
6	Juhri	Anggota	SD
7	Suharyanto	Anggota	SLTP

Sumber: Kantor Desa Sei Beras-beras Tahun 2018

Tabel diatas merupakan berdasarkan pendidikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Beras-beras yang berjumlah 7 orang. Dan dengan rata-rata pendidikan terakhirnya SLTP sederajat.

Alasan dalam memilih lokasi penelitian pada Desa Sei Beras-beras karena dalam observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam aparatur pemerintah desa sebagai pelaksana tugas-tugas desa belum mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Karena dari setiap individu masih terdapat beberapa kurangnya pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan yang dapat di lihat dari beberapa tingkat pendidikan terakhirnya. Hal ini juga merupakan kurang efektif dalam melaksanakan segala aktivitas yang ada pada suatu Pemerintahan Desa. Maka dapat dilihat di Desa Sei Beras-beras dimana dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Perangkat Desa masih terdapat beberapa kendala dan hambatan oleh aparatur pemerintah desa, yaitu :

- Adanya keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah desa itu sendiri yang bisa di lihat dari pendidikan terakhirnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adanya keterbatasan aparat pemerintah desa saat melakukan tugasnya, rendahnya pendidikan aparat desa sehingga yang penulis dapatkan banyak pada saat jam kantor berlangsung namun petugas Perangkat Desa tidak berada di Kantor Desa hanya beberapa staf saja yang ada saat jam kantor berlangsung.
3. Seharusnya ada atau tidaknya suatu pekerjaan pada hari itu para Perangkat Desa turut hadir agar terciptanya dalam kedisiplinan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi maupun pelayanan yang lainnya dan tidak harus menunggu lama, hal ini yang membuat kurang efektifnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
4. Tidak memanfaatkan adanya kemajuan teknologi seperti sudah majunya sebuah teknologi yang mana seharusnya teknologi itu untuk membantu kita memperoleh informasi, namun kenyataannya pada saat jam kantor berlangsung sering didapati para Perangkat Desa bermain handphone di jam kerja, sulit menerima cara-cara baru seperti pada saat penginputan data-data untuk pelaporan profil desa yang secara online masih adanya kurang pemahaman
5. Rendahnya tingkat sumber daya manusia dapat menjadikan kurangnya keprofesionalan dalam bekerja dan sebagainya. Akibat dari beberapa keterbatasan tersebut sehingga dapat membuat pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak berjalan dengan optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal didalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa maka diperlukan adanya kemampuan dan kemauan baik dari pemimpinnya dan juga dari Perangkat Desa yang berkualitas, maupun dari fasilitas sarana dan prasarana serta pendukung lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kemauan dan kemampuan serta sarana yang dapat mendukung kelancaran proses penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan persoalan yang di kemukakan diatas, maka menunjukkan kurang efektifnya Pemerintahan Desa sehingga berdampak pada kurang optimalnya dalam Penyelenggaraan terhadap masyarakat. Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh dengan judul **Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa masalah yang ada diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apa saja hambatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Sei Beras-Beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sei Beras-Beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta berbagi pengalaman yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan dan selama proses penelitian berlangsung.
2. Sebagai bahan acuan dan masukan serta bahan pertimbangan bagi peneliti yang lain yang meneliti dengan kasus yang sama.
3. Sebagai gambaran Aparatur Pemerintah Desa untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sei Beras-Beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

1.5 Batasan Penelitian

Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka penulis membatasi permasalahan penelitian hanya pada Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sei Beras-Beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematikan Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematikan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan berbagai teori-teori, definisi, yang bersumber dari buku, review, jurnal serta konsep mengenai penelitian Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa di desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan metode penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, pemilihan tempat dan waktu, serta sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, sejarah singkat, karakteristik objek penelitian, serta aktifitas dan struktur organisasi di Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang berdasarkan data dan fakta yang terjadi dengan metode yang telah ditetapkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti, dan kemudian peneliti menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan penutup yang mana tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

